



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 186 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Bupati Barito Utara telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2013 sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/809/2013 tanggal 23 Oktober 2013 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
- b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

- 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4705);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2012 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
dan
BUPATI BARITO UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 semula berjumlah Rp. 669.068.845.740,00 Bertambah sejumlah Rp. 146.270.763.178,15 sehingga menjadi Rp. 815.339.608.918,15 dengan rincian sebagai berikut :

- | | | | |
|--------------------------------------|----|--------------------|--|
| 1. Pendapatan | | | |
| a. Semula | Rp | 642.362.081.930,00 | |
| b. Bertambah/ (Berkurang) | Rp | 110.034.315.319,39 | |
| Jumlah Pendapatan setelah perubahan | Rp | 752.396.397.249,39 | |
| 2. Belanja | | | |
| a. Semula | Rp | 669.068.845.740,00 | |
| b. Bertambah/ (berkurang) | Rp | 146.270.763.178,15 | |
| Jumlah Belanja setelah Perubahan | Rp | 815.339.608.918,15 | |
| 2. Pembiayaan | | | |
| a. Penerimaan | | | |
| Semula | Rp | 32.853.766.010,00 | |
| Bertambah/ (berkurang) | Rp | 174.562.322.851,82 | |
| Jumlah Penerimaan setelah Perubahan | Rp | 207.416.088.861,82 | |
| b. Pengeluaran | | | |
| Semula | Rp | 6.147.002.200,00 | |
| Bertambah/ (berkurang) | Rp | 0,00 | |
| Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan | Rp | 6.147.002.200,00 | |

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp	24.500.000.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	3.700.000.000,00
Jumlah Pendapatan asli daerah setelah Perubahan	Rp	28.200.000.000,00

b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp	596.450.802.918,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	43.747.108.428,00
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp	640.197.911.346,00

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1) Semula	Rp	21.411.279.012,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	62.587.206.891,39

Jumlah Pendapatan asli daerah setelah Perubahan	Rp	83.998.485.903,39
---	----	-------------------

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah

1) Semula	Rp	2.750.000.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	690.000.000,00
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp	3.440.000.000,00

b. Retribusi Daerah

1) Semula	Rp	10.353.000.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	3.334.500.000,00
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp	13.687.500.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

1) Semula	Rp	3.500.000.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	101.073.000,00
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah Perubahan	Rp	3.601.073.000,00

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

1) Semula	Rp	7.897.000.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	(425.573.000,00)
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah Perubahan	Rp	7.471.427.000,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil

1) Semula	Rp	82.838.812.918,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	43.747.108.428,00

Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp	126.585.921.346,00	
b. Dana Alokasi Umum			
1) Semula	Rp	475.180.280.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan	Rp	475.180.280.000,00	
c. Dana Alokasi Khusus			
3) Semula	Rp	38.431.710.000,00	
4) Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan	Rp	38.431.710.000,00	
(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:			
a. Hibah			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah Hibah setelah Perubahan	Rp		0,00
b. Dana Darurat			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan	Rp		0,00
c. Dana Bagi Hasil Pajak			
1) Semula	Rp	19.411.279.012,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	21.308.032.659,39	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan	Rp		40.719.311.671,39
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	35.129.574.232,00	
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan	Rp		35.129.574.232,00
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya			
1) Semula	Rp	2.000.000.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	6.149.600.000,00	
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan	Rp		8.149.600.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp	335.979.632.864,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	98.108.800.522,15	
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan	Rp		434.088.433.386,15

b. Belanja Langsung			
1) Semula	Rp	333.089.212.876,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	48.161.962.656,00	
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	Rp		381.251.175.532,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai			
1) Semula	Rp	274.777.524.784,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	90.144.478.522,15	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp		364.922.003.306,15

b. Belanja Bunga			
3) Semula	Rp	0,00	
4) Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan	Rp		0,00

c. Belanja Subsidi			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan	Rp		0,00

d. Belanja Hibah			
1) Semula	Rp	35.778.702.200,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	5.934.322.000,00	
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp		41.663.024.200,00

e. Belanja Bantuan Sosial			
1) Semula	Rp	1.706.000.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	30.000.000,00	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp		1.736.000.000,00

f. Belanja Bagi Hasil			
1) Semula	Rp	784.100.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp		784.100.000,00

g. Belanja Bantuan Keuangan			
1) Semula	Rp	21.933.305.880,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	50.000.000,00	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan	Rp		21.983.305.880,00

h. Belanja Tidak Terduga			
1) Semula	Rp	1.000.000.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	2.000.000.000,00	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp		3.000.000.000,00

- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp	26.627.924.300,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	5.495.844.794,00
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan		Rp 32.123.769.094,00
 - b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula	Rp	130.778.908.905,50
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	10.167.687.020,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan		Rp 140.946.595.925,50
 - c. Belanja Modal

1) Semula	Rp	175.682.379.670,50
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	32.498.430.842,00
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan		Rp 208.180.810.512,50

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. Penerimaan sejumlah Rp 207.416.088.861,82

1) Semula	Rp	32.853.766.010,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	174.562.322.851,82
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp 207.416.088.861,82
 - b. Pengeluaran sejumlah Rp 6.147.002.200,00

1) Semula	Rp	6.147.002.200,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		Rp 6.147.002.200,00
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp 195.635.086.661,82

1) Semula	Rp	21.072.763.810,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	174.562.322.851,82
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan		Rp 195.635.086.661,82
 - b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp 0,00

1) Semula	Rp	11.781.002.200,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan		Rp 11.781.002.200,00
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp 0,00

1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan		Rp 0,00

d.	Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp 0,00		
	1) Semula	Rp	0,00
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan	Rp	0,00
e.	Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp 0,00		
	1) Semula	Rp	0,00
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan	Rp	0,00
f.	Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp 0,00		
	1) Semula	Rp	0,00
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Penerimaan kembali piutang daerah setelah Perubahan	Rp	0,00
3)	Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:		
a.	Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp 3.781.002.200,00		
	1) Semula	Rp	3.781.002.200,00
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah Perubahan	Rp	3.781.002.200,00
b.	Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp 2.366.000.000,00		
	1) Semula	Rp	2.366.000.000,00
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah Perubahan	Rp	2.366.000.000,00
c.	Pembayaran pokok utang sejumlah Rp 0,00		
	1) Semula	Rp	0,00
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Pembayaran pokok utang setelah Perubahan	Rp	0,00
d.	Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp 0,00		
	1) Semula	Rp	0,00
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Pemberian pinjaman daerah setelah Perubahan	Rp	0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;

2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal, 25 Oktober 2013

BUPATI BARITO UTARA,

ttd

NADALSYAH

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal, 25 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

BAMBANG EDHY PRAYITNO